

FENOMENA KESENJANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ANTARA : KOTA DAN DESA**Devita Maharani¹, Selviana Kartika Putri², Serly Kurniawati³,
Ade Perkasa⁴, Ahmat Rifa'i⁵**^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh SitubondoE-mail : ¹devitamaharani522@gmail.com, ²selfimalolo14@gmail.com,³serliriskiyani590@gmail.com, ⁴ade.perkasa2014@gmail.com, ⁵ripaaaaarep@gmail.com**ABSTRAK**

Kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan tersebut, meliputi disparitas fasilitas pendidikan, kualitas guru, kondisi ekonomi keluarga, serta akses terhadap teknologi dan pendidikan tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research), penelitian ini menghimpun dan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta laporan resmi nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah di pedesaan menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualifikasi tenaga pendidik, minimnya akses digital, serta tekanan ekonomi keluarga yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah. Sebaliknya, sekolah di perkotaan memperoleh dukungan fasilitas modern, kompetensi guru yang lebih baik, dan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan akademik siswa. Data BPS dan PISA mengonfirmasi bahwa perbedaan capaian belajar antara kota dan desa masih signifikan. Kesenjangan pendidikan bukan hanya persoalan geografis, tetapi merupakan refleksi ketidakmerataan investasi pendidikan dan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, strategi pemerataan yang komprehensif meliputi peningkatan infrastruktur, distribusi guru profesional yang berkeadilan, perluasan akses digital, dan dukungan ekonomi bagi keluarga miskin sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: kesenjangan pendidikan, kota dan desa, kualitas guru, infrastruktur pendidikan, ekonomi keluarga, digitalisasi pembelajaran, pemerataan pendidikan.

ABSTRAK

The educational gap between urban and rural areas in Indonesia remains a structural issue affecting the quality of human resources. This study aims to analyze the factors causing this disparity, including disparities in educational facilities, teacher quality, family economic conditions, and access to technology and higher education. Using a descriptive qualitative approach with library research methods, this study collected and reviewed various sources such as scientific journals, books, policy documents, and official national and international reports. The study results show that schools in rural areas face limited infrastructure, low teacher qualifications, limited digital access, and family economic pressures, which impact high dropout rates. In contrast, schools in

urban areas are supported by modern facilities, better teacher competency, and a social environment conducive to student academic development. Statistics Indonesia (BPS) and PISA data confirm that the difference in learning outcomes between urban and rural areas remains significant. The educational gap is not simply a geographical issue, but a reflection of unequal educational investment and policies that have not fully adapted to local conditions. Therefore, a comprehensive equity strategy including infrastructure improvements, equitable distribution of professional teachers, expanded digital access, and economic support for low-income families is essential to achieving educational equity in Indonesia.

Keywords: education gap, urban and rural areas, teacher quality, educational infrastructure, family economy, digitalization of learning, educational equity.

PENDAHULUAN

Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih menjadi masalah besar di Indonesia. Anak sekolah desa sering menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Banyak sekolah di desa masih tidak memiliki listrik yang memadai, akses internet yang terbatas, bahkan ruang belajar yang tidak layak. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi sekolah di kota yang umumnya sudah dilengkapi fasilitas yang lengkap dan modern.

Anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, tenaga pengajar yang lebih baik, dan peluang akademik yang lebih baik. Sebaliknya, anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan seringkali menghadapi banyak tantangan, termasuk infrastruktur sekolah yang terbatas, akses teknologi yang terbatas, dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, seperti fakta bahwa sebagian masyarakat di daerah pedesaan terkadang tidak memprioritaskan pendidikan formal (Collins et al., 2021).

Selain itu, jumlah dan kualitas guru di desa juga masih tertinggal. Banyak guru di daerah pedesaan belum memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Kondisi ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak bisa berjalan maksimal. Jarak sekolah yang jauh juga menjadi masalah. Bahkan banyak anak di desa harus berjalan kaki menuju sekolah. Ini tentu sangat berbeda dengan anak-anak di kota yang bisa mengakses sekolah dengan lebih mudah dan nyaman. Kebanyakan keluarga di desa kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Karena keterbatasan ekonomi, tidak sedikit anak-anak yang akhirnya putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan jumlah lulusan sekolah menengah di desa lebih rendah dibandingkan dengan di kota. Bahkan ada pula yang tidak memiliki semangat belajar dan sekolah hingga memutuskan bekerja di usia dini.

Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 25+ adalah 9,07 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini bervariasi di setiap provinsi, dengan Papua yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah. Tak hanya itu sekitar 2 dari 5 penduduk usia 15+ yang memiliki ijazah SMA/ sederajat, dan jumlah total sekolah (PAUD-SLB) mencapai 441.004 unit. Dibandingkan dengan BPS tahun 2024 rata-rata lama sekolah usia 15+ adalah 9,22 tahun, atau setara dengan jenjang kelas 9 SMP. Usia 25+ sekitar 54,9% adalah lulusan jenjang dasar (SD/SMP/setara), 29,81% lulusan jenjang menengah. Ini membuktikan bahwa jurang pendidikan antara kota dan desa masih sangat lebar. Bahkan, menurut data PISA 2022, kemampuan siswa di desa dalam hal membaca, matematika, dan sains jauh di bawah siswa yang tinggal di kota. Data ini dicantumkan bukan hasil PISA 2024, melainkan

data dari siklus PISA 2022 yang dirilis pada tahun 2023 dan 2024. Skor PISA 2022 untuk Indonesia menunjukkan penurunan di semua domain (membaca, matematika, dan sains) dibandingkan PISA 2018. Indonesia berada di peringkat 69 dari 80 negara dalam PISA 2022, dengan skor membaca 359.

Selain itu, pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 serta diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31 UUD 1945 "Anak-anak berhak memperoleh pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan yang agama, kebangsaan, dan kewarganegaraan." Tanggung Jawab Negara Dalam Pasal 31 UUD 1945, terdapat beberapa unsur yang menunjukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas Pendidikan. Kata "wajib" dalam kalimat "Negara wajib memberikan pendidikan" menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Membantu dengan memberikan pendidikan, negara membantu anak-anak mencapai tujuan mereka. potensi penuh dan menjadi warga negara yang sejahtera. Pendidikan agama, kebangsaan, dan kewarganegaraan, Negara tidak hanya memberikan pendidikan umum, tetapi juga memberikan pendidikan agama, kebangsaan, dan kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus mencakup aspek-aspek yang terkait dengan identitas dan kewarganegaraan (Selviana et al., 2024).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (1) "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara". Ini artinya adalah sangat jelas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, terlebih pendidikan sejak dini terhadap anak-anak dari kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya manusia yang melimpah, namun apabila sumber daya manusia itu kurang diperhatikan maka tidak menutup kemungkinan Negara Indonesia menjadi Negara yang sulit untuk lebih maju lagi (Iv et al., 2020).

Namun demikian, dalam implementasinya, realisasi pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya kesenjangan (gap) dalam pembiayaan pendidikan, antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan (Apriliansyah et al., 2025). Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti program bantuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, yang diharapkan dapat memperluas akses bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil (Collins et al., 2021). Kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan isu klasik yang terus menjadi perhatian dalam kajian pendidikan nasional. Perbedaan ini tidak hanya mencakup aspek fasilitas, sumber daya manusia, dan akses pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan pandangan, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Adapun salah satu teori tentang kesenjangan pendapat dalam pendidikan yang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah dan pihak sekolah terjadi karena adanya jarak antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam konteks program bantuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, kesenjangan ini semakin tampak karena standar nasional yang bersifat ideal tidak selalu sesuai dengan kesiapan sekolah yang berbeda-beda. Pemerintah menganggap bahwa bantuan pendidikan dan digitalisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan mutu dan pemerataan sesuai SNP, tetapi sekolah sering kali merasa bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, baik dari segi sarana prasarana, kompetensi guru, maupun kondisi peserta didik. Di sisi

lain, digitalisasi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar sesuai standar, justru menimbulkan berbagai kendala ketika diterapkan pada sekolah dengan infrastruktur yang terbatas. Guru yang belum sepenuhnya menguasai teknologi, keterbatasan perangkat, serta akses internet yang tidak merata membuat sekolah menilai bahwa digitalisasi tidak dapat diberlakukan secara seragam. Hal ini memperkuat kesenjangan pendapat antara tujuan kebijakan dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Secara keseluruhan, teori kesenjangan pendapat menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memahami realitas sekolah, serta kesediaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah. Harmonisasi antara standar nasional dan kondisi lapangan diperlukan agar kebijakan pendidikan tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga efektif, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Dari keterangan diatas, artikel ini hadir dengan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor struktural dan kebijakan yang mempengaruhi disparitas kualitas guru serta fasilitas sekolah dan akses pendidikan tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, serta meninjau sejauh mana kondisi ekonomi keluarga berdampak pada kesenjangan dan juga keberhasilan pendidikan jenjang menengah dan tinggi antara pendidikan di kota dan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji disparitas dalam rasio guru berkualitas di sekolah, ketersediaan fasilitas sekolah, dan akses ke program pengembangan guru serta berfokus pada faktor-faktor ekonomi yang turut berperan dalam kesenjangan dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kepustakaan dengan metode studi literatur (*library research*). Menurut Sugiyono, "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (di mana) peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi." Sedangkan "Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu keadaan objek alamiah dengan mempelajari sesuatu secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab dengan detail permasalahan yang diteliti." Dan "Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi." Menurut Lexy J. Moleong "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah." Dan Sutrisno Hadi mengatakan "Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian di mana data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya."

Secara umum penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui analisis berbagai sumber tertulis. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep secara sistematis tanpa menggunakan data numerik, sedangkan penelitian kepustakaan mengandalkan data dari buku, jurnal, dokumen resmi, serta sumber ilmiah lain tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Melalui metode studi

literatur, peneliti menelusuri, menyeleksi, dan menganalisis teori serta hasil penelitian sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian jenis ini memberikan gambaran yang mendalam dan terstruktur mengenai topik yang dikaji melalui penguatan teori dan referensi ilmiah yang relevan. Teknik ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena mulai dari kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia, perbedaan kualitas guru di kota dan desa yang dapat mempengaruhi kualitas belajar anak, serta fasilitas yang berbeda antara sekolah di desa dan kota yang diberikan sebagai bukti dan bentuk perbedaannya nyata dalam kualitas infrastrukturnya. Sumber data diperoleh dari berbagai artikel dan jurnal seperti ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah di pedesaan dan perkotaan, partisipasi orang tua dalam pendidikan anak, serta faktor pendidikan dan ekonomi di Indonesia dalam wilayah kota dan desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola kesenjangan ekonomi, kualitas guru dan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Melalui tinjauan literatur ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia terutama di kota dan desa.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Melihat kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan masalah yang sering ditemukan secara transparan tentang kesenjangan ini dimana sudah menjadi hal yang biasa dalam dunia pendidikan. Maka dari itu artikel ini dibuat untuk meneliti lebih dalam mengapa hal seperti itu lumrah dan dinormalisasikan oleh masyarakat di Indonesia. Dengan melihat kesenjangan-kesenjangan yang sering di beritakan oleh media televisi bahwa sekolah dan siswa pelajar di desa masih banyak yang kesulitan dalam mendapatkan ilmu dikarenakan fasilitas jalan, fasilitas didalam sekolah serta kondisi ekonomi orang tua dan kualitas guru yang membuat kualitas pendidikan anak menurun dari pada siswa dan sekolah di perkotaan.

Perbedaan Infrastruktur Pendidikan Diarea Sekolah Pada Wilayah Kota Dan Desa

Terlihat bahwa akses terhadap pendidikan di wilayah pedesaan relatif lebih terbatas dibandingkan dengan perkotaan. Sekolah dasar umumnya telah tersedia hampir di seluruh wilayah, namun untuk jenjang pendidikan menengah dan atas, jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, dan minimnya sarana pendukung menjadi hambatan utama bagi peserta didik di pedesaan. Infrastruktur pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan adalah faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki ruang kelas yang lebih baik, laboratorium, perpustakaan yang lebih lengkap, dan akses internet yang lebih cepat. Fasilitas ini mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif dan dapat meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam belajar. Sebaliknya, di daerah pedesaan, infrastruktur pendidikan sering kali sangat terbatas. Zulkarnaen dan Handoyo (2021) dalam penelitian mereka tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan mengungkapkan bahwa banyak sekolah di pedesaan yang kekurangan ruang kelas yang memadai, bahkan beberapa sekolah terpaksa mengadakan kegiatan belajar mengajar di ruang yang tidak layak. Keterbatasan infrastruktur ini membuat pendidikan di pedesaan kurang mampu bersaing dengan pendidikan di perkotaan, di mana fasilitas yang lebih lengkap dan lebih baik mendukung efektivitas pembelajaran. (Wahidmurni, 2025)

Dari keterangan kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan pada infrastruktur sekolah di desa dan kota, Pemerintah Indonesia melalui (Kemendikbud), telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur pendidikan antara sekolah di desa dan kota berdasarkan data PISA 2022. Upaya ini didasarkan pada data empiris dari survey nasional dan

penelitian internasional. Terdapat upaya-upaya penting yang utama dilakukan oleh pemerintah guna menunjukkan dan membuktikan dampak positif dari program yang dibuat yaitu: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Perbaikan Infrastruktur sekolah, Program Sekolah Aman Bencana (PSAB) dan Sekolah Rehabilitas, Inisiatif Digital: Rumah Belajar dan Gerakan Literasi Sekolah Serta Dana Desa Untuk Pendidikan.

Dengan demikian, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur, dan empat point lainnya yang tercantum diatas, ketimpangan pasti tetap ada karena masalah distribusi dan implementasi kebijakan yang belum optimal. Salahnya sasaran dalam memberikan dana kepada kota ataupun desa juga masih ada dan tetap terjadi hingga saat ini. (Wahidmurni, 2025)

Perbedaan Kualitas Guru Pengajar Di Sekolah Pedesaan Dan Perkotaan

Selain faktor sarana, distribusi tenaga pendidik juga menjadi persoalan penting. Sekolah di kota umumnya memiliki guru dengan kualifikasi akademik yang lebih baik dan bersertifikat profesional, sedangkan di desa banyak dijumpai guru honorer dengan beban mengajar yang tinggi dan kesempatan pengembangan diri yang terbatas. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada mutu pengajaran dan hasil belajar siswa. Guru di pedesaan juga menghadapi tantangan lingkungan sosial dan geografis yang tidak mudah, seperti keterbatasan akses pelatihan dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang kurang mendukung. Kualitas guru menjadi salah satu hal yang menjadi pokok perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena guru diakui sebagai elemen penentu dari keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembelajaran dan bagaimana masa depan peserta didik.

Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report pada tahun 2016, mutu pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang, sedangkan kualitas guru di Indonesia menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang yang ada di dunia (Utami, 2019). Sementara itu pada hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang merupakan salah satu rujukan penilaian mutu pendidikan di dunia, peringkat kualitas pendidikan di Indonesia berada di golongan urutan terbawah, yaitu peringkat 72 dari 78 negara. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang profesional adalah guru yang: 1) memenuhi syarat kualifikasi akademik yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya; dan 2) menguasai empat kompetensi guru, yaitu: kompetensi pribadi, pedagogik, profesional, dan sosial. (Rohmah Susiani & Diny Abadih, 2021)

Dari uraian di atas memang seharusnya guru memiliki kualitas yang baik namun, guru yang mengajar di desa cenderung sulit dalam meningkatkan kualitas mengajarkan, hal itu terjadi karena dampak fasilitas di sekitar area sekolah juga sangat sulit. Ada akses jalan yang rusak sehingga guru susah dalam mengikuti kegiatan seperti seminar dan pelatihan lainnya. Kadang kala transportasi yang digunakan juga sulit di dapat. Hal itu yang membuat kualitas pendidikan di desa sangat berbeda dengan di area perkotaan. Perbedaannya juga sangat terlihat dari fasilitas sekolah yang diberikan kepada guru di kota beda dengan fasilitas yang diberikan sekolah kepada guru di pedesaan. Gajinya pun juga berbeda antara gaji guru di desa dan perkotaan.

Diketahui pula bahwa program pemerintah seperti bantuan sarana, tunjangan guru, dan beasiswa memang memberikan dampak positif, namun implementasinya sering kali tidak merata dan bersifat sementara. Program tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan digital, atau pembelajaran berbasis proyek lebih banyak diterapkan di kota, sementara di desa masih terkendala fasilitas dan tenaga pendukung. Hal ini memperlebar kesenjangan dalam penguasaan keterampilan abad 21, seperti literasi digital dan berpikir kritis. Kesenjangan antara kota dan desa ini

mencerminkan masalah struktural yang lebih luas. Ketidakmerataan investasi pendidikan, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang memperkuat siklus ketertinggalan di wilayah pedesaan. Ketika sekolah dengan sumber daya terbatas menghasilkan prestasi yang rendah, maka minat guru berkualitas untuk mengajar di sana semakin menurun, sehingga ketimpangan semakin sulit diatasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada ketidaksetaraan kesempatan ekonomi dan sosial antarwilayah.

Maka dari itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kesenjangan-kesenjangan tersebut yaitu dengan cara melakukan supervisi yang dilakukan oleh supervisor, menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran, mengadakan rapat antar kepala sekolah dengan para guru, aktif mengikuti penataran, seminar, pelatihan untuk pengembangan diri, mengadakan kunjungan antar sekolah untuk studi banding, dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Selain itu, pemberian gaji yang layak untuk kesejahteraan hidup guru juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas guru dan secara relevan berhubungan dengan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk fasilitas guru di desa juga lebih diperhatikan lagi. Akses jalan dari desa menuju kota yang rusak atau sulit dilalui diharapkan untuk pemerintah berikan dana perbaikan jalan. Fasilitas-fasilitas lainnya seperti akses internet, bahan pembelajaran buku dan lain sebagainya juga disediakan oleh sekolah dengan adanya bantuan dari pemerintah.

Kesenjangan Ekonomi Orang Tua Di Daerah Pedesaan Dan Perkotaan

Menurut Muallim, semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Disamping itu ada juga para ahli yang membedakan lebih luas, bahkan meliputi pengajaran, sedangkan pengajaran hanya merupakan sebagian kecil dari pada pendidikan, pendapat tersebut bersumber dari anggapan bahwa mendidik itu membina aspek-aspek kepribadian seperti sikap mental, moral budi pekerti, kesadaran sosial nasionalisme dan sebagainya. Sedangkan mengajar hanya memberikan ilmu tertentu kepada anak didik dengan demikian nilai pendidikan berbeda dengan nilai pengajar. (Perdana et al., 2023)

Kita ketahui pentingnya pendidikan bagi masa depan anak bangsa. Namun tidak semua anak mampu sekolah setinggi mungkin, kebanyakan hal itu terjadi karena masalah ekonomi keluarga. Dan hal itu juga tidak jarang terjadi di wilayah pedesaan yang gaji pekerjaannya tidak sama dengan yang di kota. Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah di daerah desa, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah. Dari sisi kualitas pembelajaran, terdapat perbedaan signifikan antara sekolah di kota dan di desa. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki capaian akademik yang lebih tinggi, baik pada hasil ujian nasional maupun penilaian internal sekolah.

Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor penting yang menentukan kualitas pendidikan anak. Banyak keluarga di Indonesia masih bergelut dengan keterbatasan finansial yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Biaya pendidikan yang terus meningkat membuat keluarga dengan penghasilan rendah harus berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. (Fitriana et al., 2025)

Kesenjangan pendidikan ini turut dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi keluarga. Anak-anak di pedesaan kerap menghadapi tekanan ekonomi yang menyebabkan mereka harus membantu pekerjaan orang tua, sehingga waktu belajar berkurang. Beban ekonomi keluarga juga menjadi faktor yang signifikan. Dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut menjadi tulang punggung keluarga atau harus membantu mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tanggung jawab ini memaksa mereka untuk mengorbankan pendidikan mereka dan mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan segera. (Raynal, n.d.) Sementara itu,

keluarga di perkotaan umumnya memiliki kesadaran pendidikan yang lebih tinggi dan sumber daya yang cukup untuk mendukung anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Akibatnya, tingkat partisipasi sekolah menengah dan perguruan tinggi jauh lebih tinggi di wilayah perkotaan. Masyarakat di pedesaan kurang menikmati hasil pembangunan. Akibat lain adalah meningkatnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendidikan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan sangat penting dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. (Khusaini Khusaini & Muvera Muvera, 2020) Meski demikian, beberapa sekolah di desa yang mendapat dukungan komunitas dan kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah menunjukkan peningkatan signifikan dalam prestasi siswa. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan berbasis konteks lokal. Upaya pemerataan pendidikan perlu mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas guru, pemberian insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil, serta program bantuan ekonomi bagi keluarga miskin agar anak tidak putus sekolah.

Kesenjangan antara kota dan desa ini mencerminkan masalah struktural yang lebih luas. Ketidakmerataan investasi pendidikan, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang memperkuat siklus ketertinggalan di wilayah pedesaan. Ketika sekolah dengan sumber daya terbatas menghasilkan prestasi yang rendah, maka minat guru berkualitas untuk mengajar di sana semakin menurun, sehingga ketimpangan semakin sulit diatasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada ketidaksetaraan kesempatan ekonomi dan sosial antarwilayah. Jadi, peran ekonomi baik dari negara maupun dari keluarga itu sangat penting untuk Pendidikan anak-anak bangsa khususnya yang ada di Indonesia. Dimana peran ekonomi ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan Pendidikan di suatu negara. (Nurul Afifah et al., 2024) Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan antara kota dan desa di Indonesia bukan hanya perbedaan geografis, melainkan cerminan dari ketidaksetaraan akses, kualitas, dan kesempatan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada pemerataan sumber daya, penguatan kapasitas sekolah desa, serta pelibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kesimpulan

Fenomena kesenjangan pendidikan antara wilayah kota dan desa di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, akses terhadap teknologi dan informasi, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Di daerah perkotaan, pendidikan cenderung lebih maju karena dukungan infrastruktur yang memadai dan akses yang luas terhadap sumber belajar modern. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya tingkat kesejahteraan, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih efektif, seperti distribusi tenaga pendidik berkualitas, peningkatan sarana prasarana sekolah desa, dan penguatan pemanfaatan teknologi pendidikan. Dengan demikian, pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

Apriliansyah, F., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Analisis Kesenjangan Pembiayaan

- Pendidikan Di Indonesia : Studi Literatur Terhadap Perbedaan Akses Dan Kualitas Antara Sekolah Negeri Dan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 753–758.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2(3), 167–186.
- Fitriana, A. Q. Z., Shahmanda, S., & Salamah, L. (2025). Keterbatasan Finansial Keluarga Yang Berdampak Kepada Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 3(1), 74–78.
- Iv, B. A. B., Mengenai, P., Dan, H. A. K., Warga, K., Tua, O., & Pemerintah, D. A. N. (2020). *Analisis undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mencakup bab iv pasal 5 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan pemerintah*. 2020(01), 82–89.
- Khusaini Khusaini, & Muvera Muvera. (2020). Prestasi Belajar dan Karakteristik Orang Tua: Studi Perbandingan Sekolah Menengah Atas Perkotaan-Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 296–310.
- Nurul Afifah, A., Ar, R., & Muhammad, Y. (2024). Peran Ekonomi Keluarga Dalam Membentuk Pendidikan Anak. *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 13–22. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah>
- Perdana, F. H., Nurfadilla, M. K., Dien, M. W. D., Lismaya, S. S., & ... (2023). Tantangan Finansial sebagai Salah Satu Penghambat Tercapainya Tujuan Pendidikan. *Academia.Edu*. https://www.academia.edu/download/108902764/Tantangan_Finansial_sebagai_Salah_Satu_Penghambat_Tercapainya_Tujuan_Pendidikan.pdf
- Raynal, I. (n.d.). *Pendidikan Ke Tingkat Sma / Smk Di Daerah*.
- Rohmah Susiani, I., & Diny Abadih, N. (2021). Kualitas Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 8(2), 292–298.
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Rafly, M., Ramadhan, S., Asahan, U., & Sumatera, A. (2024). *No Title*. 3, 44–51.
- Wahidmurni. (2025). Ketimpangan Kualitas Pendidikan Antara Sekolah Di Perkotaan Dan Di Pedesaan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(November), 2588–2593.